



Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah : Internalisasi Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Muhammad Junaedi ^{✉1}, Fajar Muharram ^{✉2}, Muhammad Yani ^{✉3}

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima November 2021 Revisi Desember 2021 Dipublikasikan Januari 2021 Keywords : Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, <i>Islamic Values, National Insight, Muhammadiyah Higher Education</i>	Artikel ini bertujuan untuk memahami makna konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah dan bentuk-bentuk implementasi akan internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah tepatnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan diskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap pimpinan Universitas dan civitas akademika kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah adalah sebagai pedoman pemikiran dan perilaku mengenai hubungan antara agama, negara dan organisasi sekaligus sebagai ijtihad politik Muhammadiyah yang bertujuan untuk menguatkan harmonisasi kebangsaan. Sedangkan model internalisasi nilai-nilai Islam yang diterapkan di dalam penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu dilakukan dalam dua bentuk pertama dengan model dakwah gerakan tanwiriyah (pencerahan) sebagaimana konsep Islam berkemajuan dan kedua dakwah Bil Amal (aksi) sebagaimana dalam prinsip teologi sosial Al Ma'un
How to Cite : Muhammad Junaedi, Fajar Muharram, Muhammad Yani. (2021). Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah : Internalisasi Nilai-nilai Islam Dalam Membangun Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 6(1), pp. 11-24. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n1.2021.pp11-24	ABSTRACT <i>The Pancasila State as Darul Ahdi Wa Syahadah: Internalization of Islamic Values in Building National Insights in Muhammadiyah Higher Education . This article aims to understand the meaning of the concept of the Pancasila State as Darul Ahdi Wa Syahadah and the forms of implementation of the internalisation of Islamic values in building national insight in the Muhammadiyah Higher Education environment, precisely at Muhammadiyah University Sidoarjo, Muhammadiyah University Surabaya and Muhammadiyah University Gresik. The methods used in this research is a qualitative description with a phenomenological approach. Data collection is done by means of observation, documentation and interviews with university leaders and the campus academic community. and organization as well as Muhammadiyah political ijtihad which aims to strengthen the harmonization of the nationality, while the internalization model of Islamic values which is applied in strengthening the national insight in Muhammadiyah universities is It is carried out in two forms, the first with the model of the tanwiriyah movement (enlightenment) as the advanced Islamic concept and the second to the Bil Amal (action) as in the principles of social theology of Al Ma'un.</i>
✉ Alamat korespondensi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia	
✉ E-mail: junaedimuhammad@umsida.ac.id; fajarmuharram@umsida.ac.id²; muhammad_yani@umsida.ac.id³;	

Copyright © 2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Fenomena kehidupan sosial kebangsaan akhir-akhir ini terusik dengan adanya berbagai macam krisis sosial kemanusiaan yang mengarah pada disintegrasi bangsa, hal yang

paling lazim terdengar adalah munculnya paham radikalisme yang melahirkan kekerasan atas nama agama atau kekerasan suci, konflik komunal, menguatnya politik identitas dengan mengakarnya ikatan-ikatan primordial, peristiwa

yang terjadi pada kasus bom bunuh diri di Polrestabes Medan pada 13 November 2019, dimana sebelumnya juga terdapat kasus bom bunuh diri yang sama terjadi di tiga lokasi Surabaya yaitu Gereja Santa Maria, Gereja Pantekosta dan Polrestabes Surabaya pada 14 Mei 2018 ataupun kasus konflik komunal di Wamena pada 23 September 2019, pembakaran bendera yang didalamnya terdapat simbol agama dan berbagai macam bentuk jenis hate speech/syiar kebencian, berita hoax dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa tersebut secara keseluruhan hampir dilatar belakangi dengan ciri khas yang sama yaitu menjadikan agama sebagai bingkai politik identitas dan kekuasaan yang menyertainya

Sejatinya semua ajaran agama, baik yang bersumber dari agama *ardhi* (bumi) yang lahir melalui sistem kepercayaan lokal masyarakat dan agama *samawi* (langit) yang lahir melalui proses wahyu kenabian, sangat menekankan arti penting penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana juga prinsip toleransi dalam kehidupan keragaman masyarakat, dalam konteks ini Indonesia merupakan negara dengan ciri pluralitas masyarakat yang sangat tinggi, karenanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, batasan identitas, kecurigaan dalam hubungan antar kelompok yang melahirkan prinsip primordialisme, etnosentrisme, stereotipe etnis, dan berbagai identitas politik aliran haruslah dikesampingkan agar tercipta integrasi nasional bangsa Indonesia.

Perjalanan historis bangsa tercatat bahwa kemerdekaan yang digapai oleh bangsa Indonesia adalah akumulasi keberhasilan yang dicapai oleh semua pejuang bangsa dengan berbagai macam latar belakang identitas etnis kelompok, suku, ras dan agama, oleh karenanya rumusan Pancasila yang ditetapkan dalam rapat BPUPKI guna membangun dasar negara merupakan hasil perjanjian bersama oleh para perumus dasar negara yang semestinya dihormati dan dijaga dengan baik, meskipun pada saat perumusan dasar negara terdapat berbagai macam silang sengkabut pendapat antar tokoh, namun Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama dalam membangun wawasan kebangsaan, dengan demikian ia adalah ideologi final yang tidak bisa dirubah karena ia lahir sesuai dengan nilai historis kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri.

Ketika kesepakatan sudah terbentuk maka kesaksian adalah kunci utama dalam membuktikan kesetiaan warga negara Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atas dasar pandangan tersebutlah Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang juga telah berperan dalam perumusan dasar negara Pancasila memandang penting untuk memberikan penguatan kembali tentang pentingnya menerapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah krisis multidimensional bangsa, hal inilah yang kemudian menelurkan gagasan prinsip Muhammadiyah dalam membangun wawasan kebangsaan pada saat Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar tahun 2005, dengan merumuskan konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, yang secara etimologis berarti Pancasila sebagai rumah perjanjian dan kesaksian, artinya tidak cukup hanya mengikat janji bersama dalam ideologi Pancasila namun ikatan janji itu harus dibuktikan dengan pengamalan etik dalam kehidupan sosial kebangsaan.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memperjuangkan maupun mengisi kemerdekaan bangsa ini, hal yang sama juga bagi organisasi Islam lainnya seperti NU, keduanya merupakan organisasi keislaman mainstream dengan pengikut Muslim terbanyak di Indonesia, ia merupakan bagian dari kekuatan dan gerakan Islam yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terdapat tokoh-tokoh besar dari kalangan NU maupun Muhammadiyah yang ikut merumuskan dasar negara Bangsa Indonesia seperti Kiai Bagus Hadikusumo, yang merupakan salah satu anggota BPUPKI, kehadiran tokoh-tokoh Islam sebagai founding father bangsa sejak awal kemerdekaan bangsa ini telah menunjukkan sikap penerimaan diri dengan lapang dada yang sangat besar meskipun terjadi perubahan sila satu dalam piagam Jakarta, sikap inilah yang kemudian perlu diejawantahkan dan diteladani oleh semua lapisan sosial masyarakat dan bangsa ini.

Pada saat ini, Muhammadiyah sudah memasuki satu abad lebih, diusianya yang sekarang, menampakkan bahwa eksistensinya Muhammadiyah mampu memberikan perubahan yang signifikan bukan hanya pada konteks kehidupan nasional kebangsaan saja, namun

juga pada kancan global, prinsip gerakan Islam yang didasarkan pada *harokah* gerakan *tajdid* atau pembaharuan dan *harokah tanwiriyyah* (gerakan pencerahan) mampu menghadirkan gerakan Islam yang dinamis dan kontekstual, ia menjawab perubahan zaman dengan berbagai macam tantangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan ditengah krisis identitas nasional bangsa akibat adanya proses modernisasi dan globalisasi yang keluar dari nafas nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Indonesia, dengan karakter organisasi yang moderat dan *wastaiyyah* inilah Muhammadiyah mampu menghadirkan gerakan dakwah yang mencerahkan, merangkul semua pihak, menerima keragaman dalam konteks kehidupan kebangsaan sehingga mampu menangkalkan berbagai paham ideologi ataupun sikap yang jauh dari nilai-nilai ekstrimisme maupun radikalisme, dengan prinsip Teologi Sosial *Al Maun* yang diusung oleh Kh Ahmad Dahlan inilah, Muhammadiyah lebih menekankan pada sikap *Tasamuh* (toleransi), *Taaayusbisli* (hidup dalam sebuah kedamaian), *Attaaruf* (saling mengenal satu sama lain) maupun *Attarohum* (saling mengasahi).

Secara umum bukti keauntetikan Muhammadiyah dalam sikap kebangsaan dalam situasi dan kondisi sekarang adalah menerima secara penuh Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia dan tetap mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah dengan berbagai bidang terutama pendidikan dan kesehatan serta lembaga-lembaga filantropi lainnya, salah satu bentuk Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan yaitu dengan hadirnya Peguruan Tinggi Aisiyah dan Muhamadiyah yang tersebar diseluruh santero republik ini, dalam dokumen resmi PP Muhammadiyah tercatat memiliki 4786 sekolah dan 171 Universitas yang tersebar diseluruh nusantara. Media pendidikan dirasa memiliki pengaruh yang sangat besar ini kerana menyangku sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan mampu menaikkan indeks pembangunan manusia di Indonesia yang unggul dan berkarakter, unggul didukung dengan sistem pendidikan yang berkemajuan dan berkarakter didukung dengan pengembangan pendidikan yang sarat dengan nafas nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Dalam penelitian terdahulu konsep negara Pancasila sebagai sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, sebenarnya sudah banyak dikaji

secara teoritis dan praktis dalam berbagai forum akademis maupun non-akademis di lingkungan media dakwah persyarikatan Muhammadiyah, namun buku khusus yang sudah diterbitkan tentang internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan melalui kepustakaan dan buku pokok mata kuliah landasan kepribadian seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih perlu dikembangkan lagi meskipun disana terdapat buku bahan ajar yang sudah diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, secara spesifik kepustakaan yang sudah mendiskrisipkan secara teoritis bisa dilihat dalam runtutan esay dan gagasan berikut :

Pertama hand book yang diterbitkan langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai hasil dari Mukhtar Muhammadiyah ke 47 di Makasar tahun 2005 yang menetapkan rumusan Pancasila sebagai Sebagai Darul Ahdi Wa Sahadah, didalamnya diuraikan tentang bagaimanakah proses pemebentukan negara indonesia, peran strategis Muhammadiyah, kedudukan negara Pancasila dan proyeksi Muhammadiyah kedepan dalam membangun bangsa.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi perguruan Muhammadiyah diantaranya yang ditulis oleh Didik Baihaqi Arif dari Universitas Ahmad Dahlan tentang konsep negara Pancasila : Negara Perjanjian dan persaksian, kemudian oleh Muhammad Salihul Hakim dkk tentang sosialisasi konsep negara Pancasila sebagai Sebagai Darul Ah'di wa Sahadah melalui media di Lingkungan persarikatan Muhammadiyah (Muhammad Saiful Hakim, 2019), kemudian oleh Dr Syamsul Hidayat akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menulis tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Sahadah dan kontribusi Muhammadiyah bagi NKRI (Syamsul Hidayat, 2016). Kemudian karya Hasnan Bahtiar tentang Dar Al-Ahdi Wa Al-Shahadah: Upaya dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan, kemudian karya Prihma Shinta Utami tentang urgensi internaliasi nilai-nilai Kemuhammadiyah berbasis wawasan kebangsaan melalui konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Prihma Shinta Utami, 2019)

Ketiga, berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi dan kerja sama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Menko PMK dalam penyebaran nilai-nilai Pancasila sebagai Darul

Ahdi Wa Syahadah di lingkungan media dakwah Muhammadiyah maupun yang ada di luar persyarikatan Muhammadiyah, serta terdapat kumpulan khotbah Jumat yang bertemakan tentang Darul Ahdi Wa Syahadah, secara umum memang kajian dan penelitian tentang konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Sahadah sudah cukup banyak dilakukan, namun dalam penelitian ini peneliti akan mengfokuskan bagaimanakah makna konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah serta bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan diskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis. dengan pendekatan ini peneliti berharap mampu memahami proses konstruksi sosial dalam pemahaman tentang makna dan bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan sumber-sumber ajaran Islam yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, oleh karenanya kajian pemaknaan dan tafsir sosial atas kenyataan penting difahami guna membangun konsepsi negara Pancasila sebagai Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah agar mampu diterapkan secara optimal, khususnya dalam ruang lingkup persyarikatan Muhammadiyah ataupun masyarakat umum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara terhadap pimpinan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Wakil Rektor Tiga Universitas Muhammadiyah Surabaya yang membidangi Kemuhammadiyahan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik serta civitas akademika yang terkait, dan dokumentasi kegiatan penelitian sebagai bagian dari data primer penelitian, dengan melakukan observasi dan wawancara langsung tentu peneliti akan mudah memahami tafsir atas pemaknaan informan dalam mengkaji konsepsi Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Sahadah serta integrasi nilai-nilai Islam dalam wawasan kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan data sekunder peneliti akan mengkaji dan meriweiew kembali penelitian terdahulu serta hasil dari sosialisasi Pancasila sebagai darul Ahdi Wa

Sahadah yang sudah di sosialisasikan melalui media lembaga persarikatan Muhammadiyah. Secara umum berikut gambaran proses pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan.



Gambar 1 : Skema alur dan tahapan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kehidupan sosial masyarakat saat ini diwarnai dengan berbagai macam tantangan krisis identitas nasional, hal ini ditandai dengan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, meningkatnya kriminalitas, degradasi moral anak bangsa, merebaknya disintegrasi bangsa dengan menguatnya konflik identitas, populisme Islam, mengakarnya paham radikalisme dengan munculnya berbagai organisasi sosial maupun keagamaan dengan beragam ideologi yang menjadi latar belakang pemikirannya, sampai pada pudarnya semangat gotong royong antar kelompok dalam kehidupan sosial masyarakat. Ditambah dengan meningkatnya kasus korupsi, disparitas, ketidakadilan sosial dan lain sebagainya, berangkat dari berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan upaya pemaknaan dan revitaliasi, penguatan kembali Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara agar nilai-nilai yang ada didalam lima sila Pancasila itu bisa terlaksana dengan baik dalam semua sendi kehidupan kebangsaan.

Sejatinya hubungan antara agama dan kehidupan sosial-politik itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain, agama hadir sebagai pedoman dan pijakan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan ajaran keagamaannya, sila satu yang berbunyi

Ketuhanan Yang Maha Esa, ini adalah konsep Tauhid yang menjadi sumber, penguat akan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kemufakatan dan keadilan, meskipun Indonesia memiliki beragam keyakinan dalam faham keagamaan, ini meniscayakan bahwa ajaran dalam sebuah agama apa-pun itu mengajarkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan hubungan anatar kewarganegaraan di Indonesia ini menjadi lebih baik.

Karena itulah, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai Islam juga ikut serta bertanggung jawab untuk memajukan bangsa ini menjadi lebih berkemajuan, guna menjawab berbagai macam tantangan kehidupan kebangsaan tersebut maka perlu dirumuskan dan ditegaskan kembali pengautan konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, yang artinya Pancasila merupakan perjanjian bersama yang bersifat final, dan kedua kita semua sebagai warga negara harus mengikat diri untuk bersaksi guna mengisi kehidupan kebangsaan ini menjadi lebih baik dan bermakna, sehingga sudah tidak tepat lagi berbicara perdebatan ideologi Pancasila, namun yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari.

Lantas bagaimanakah makna atau pemahaman Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah ini khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan bagaimanakan implementasi atau penerapan internalisasi nilai-nilai Islam dalam penguatan Wawasan Kebangsaan.

Makna Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah memang sudah banyak disosialisasikan di berbagai lembaga atau-pun Amal Usaha Muhammadiyah sejak 2015, pasca muktamar di Makasar, termasuk didalamnya yang terdapat di Perguruan Tinggi Aisiyah dan Muhammadiyah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penguatan kembali wawasan kebangsaan bagi civitas akademika dosen dan mahasiswa yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, fenomena yang muncul dikalangan masyarakat ataupun mahasiswa masih ada sebagian individu maupun kelompok yang mempertentangkan rumusan dasar negara Pancasila dengan apa yang menjadi basis ideologinya seperti mempertentangkan

Pancasila dengan Negara Bersyariat Islam, hal ini bisa dilihat dengan menariknya diskursus Pancasila dengan Syariat sebagai bagian dari pertarungan Ideologis baik di kalangan akademisi maupun kelompok atau masyarakat secara luas, ada sekelompok yang cukup militan dan teguh dengan pemikirannya bahwa salah satu cara untuk menegakkan bangsa ini agar menjadi negeri yang lebih baik maka harus kembali pada ajaran agama Ilahi, ajaran syariat Islam.

Berangkat dari permasalahan inilah kita bisa meninjau beberapa referensi yang sudah ditulis oleh beberapa akademisi, misalnya penelitian terbaru yang dilakukan oleh Deny JA dengan LSI-nya melakukan survey tentang penerimaan Pancasila sebagai dasar negara menurutnya 13 tahun terakhir, presentase publik pro-Pancasila menurun hingga 10 persen. Seperti yang diungkapkan oleh Deny JA pada tanggal 17 Juli 2018 dalam laman detik.com, pada tahun 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2 %. Lima tahun kemudian tahun 2010, angkanya menjadi 81,7%. Tahun 2015 angkanya menjadi 79,4 % dan tahun 2018 menjadi 75,3%. Jadi dalam waktu 13 tahun, jumlah publik yang pro-Pancasila menurun 10 %, hasil survey menunjukkan ketika publik pro-Pancasila menurun, disisi yanglain publik yang pro-NKRI bersyariah mengalami kenaikan 9 % selama 13 tahun dari tahun 2005 yang angkanya 4,6 % tahun 2018 menjadi 13,2%.(Laporan Deni JA , 2019)

Dalam buku “NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik yang Manusiawi “ (2019), kita bisa meninjau tentang diskursus hubungan antara Agama, negara, dan Pancasila, Buku lain yang ditulis oleh Prof Haidar Nasir, ketua umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, beliau dalam disertasinya juga sudah menulis tentang Islam Syariat (2013) , dan juga apa yang ditulis oleh Baidawy (2015) dalam karyanya, ia menawarkan sebuah sintesa gagasan wawasan kebangsaan dengan mengkorelasikan konsep negara dalam bingkai Islam dan bingkai Pancasila dengan konteks keindonesiaan, sebuah gagasan profetik yang membumikan nilai-nilai Agama dalam kehidupan kebangsaan.

Terlepas dari perdebatan dalam pemaknaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Muhammadiyah menegaskan hubungan antara agama dengan politik, dalam seminar Pra-muktamar Muhammadiyah ke 48 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2020, Prof Haidar Nasir dan Prof Din Syamsudin, menegaskan kembali bahwa konsep negara

Pancasila sebagai Darul Ahdi adalah sesuatu yang final, ia tidak perlu diperdebatkan lagi karena menjadi kesepakatan bersama oleh semua lapisan sosial masyarakat, selanjutnya yang terpenting adalah kesadaran kolektif bangsa ini dalam mengisi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial kebangsaan, menurut Prof Din Syamsudin sudah saatnya kita mengarah pada *Dinul Hadhorol Wal Fadhilah* yaitu negara yang berperadaban dan berkemajuan, ini adalah ijtihad politik Muhammadiyah hal ini selaras dengan apa yang diusung oleh Muhammadiyah dengan Islam yang berkemajuan, hal yang sama juga ditegaskan oleh Prof Haidar Nasir bahwa kita tidak perlu menguras energi dalam pertentangan ideologi dan bentuk ideal suatu negara, apa yang sudah menjadi konsensus bersama di Indonesia harus ditegakkan bersama-sama, jangan sampai ada penegasian terhadap kelompok yang berbeda (Sidoarjo : 2020).

Islam syariat dalam konteks khilafah Islam, memang tidak menemukan bentuk yang ideal di negara Indonesia bahkan di negara-negara Timur Tengah sekalipun yang notabene sebagai negara-negara Muslim, karena ia bertentangan dengan sistem tata negara yang bersangkutan, menurut Prof Haidar Nasir ada dua alasan penting dalam politik sistem pemerintahannya harus disesuaikan dengan negara-negara yang bersangkutan, pertama adalah alasan teologis, misal dalam ayat Al Quran ada ayat *Kholifah fil Ardy*, manusia memang menjadi kholifah pemimpin di muka bumi, untuk memakmurkan bumi maka dibutuhkan konsep negara, namun ayat yang berbicara tentang *istahlaf* kepemimpinan tidak mewujudkan dalam bentuk pola sistem tertentu melainkan ia bersifat ijtihad.

Kedua adalah alasan historis setelah masa Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak menunjuk penggantinya sebagai pemimpin, setelah itu kemudian kepemimpinan Islam mewujudkan dalam bentuk Khulafaurrosyidin, berlanjut masa dinasti-dinasti, Umayyah, Abasiyah dan seterusnya, realitas sejarah ini menunjukkan tidak tunggal, setiap masa dan negara masing-masing mendirikan negara dengan bentuknya masing-masing seperti saat ini Arab Saudi dengan Mamlakah Arabiyah, Iran dengan Republik dan lain-lain. Bagi Muhammadiyah ummat Islam tidak diperbolehkan untuk saling menegasikan kelompok yang berbeda, maka ijtihad politik Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada

slogan-slogan cinta NKRI semata melainkan mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan aksi-aksi nyata (Sidoarjo, 2020).

Karena itulah demi menguatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara di tengah krisis politik dan populisme Islam, Muhammadiyah menegaskan kembali pengatan Pancasila, hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Rektor Tiga Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr Mahsun, M.Ag yang membidangi kemuhammadiyah (Surabaya : 2020) menurutnya, di kalangan warga Muhammadiyah terjadi polarisasi dalam memaknai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, realitasnya ada yang berbasis pada pemahaman khilafah, meskipun ada yang mengatakan itu kesusupan, entah itu kesusupan atau tidak tapi nyatanya mereka itu warga Muhammadiyah, tapi pemikirannya menyimpang dari pakem Muhammadiyah, oleh sebab itu dengan adanya sosialisasi Darul Ahdi Wa Syahadah ini mulai terlihat orang-orang yang tidak faham ideologi Muhammadiyah, itu menjadi kelihatan sikapnya, menurut Dr Mahsun M.Ag, Muhammadiyah tidal mengenal faham tentang Khilafah itu. Lalu mereka beranggapan kok Muhammadiyah enteng begini dengan menerima Pancasila, mereka beranggapan harus tegakkan hilafah dan syariah padahal khilafah itu tidaklah real bisa diterapkan di Indonesia, justru di Muhammadiyah itu spesifik “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya, itu lebih tajam daripada khilafah dan syariah, dengan adanya sosialisasi negara Pancasila jelas ini merupakan pedoman perilaku.

Sejalan dengan pendapat para tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bagi akademisi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah misalnya apa yang disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Dr Hidayatullah M.Si, dalam wawancara dengan peneliti, beliau menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang sudah final, dan kalau menilik sejarah berdirinya Republik ini peran tokoh-tokoh Islam luar biasa didalamnya, mereka berkorban bukan hanya untuk kelompok Islam saja tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara, konsep tauhid sebagaimana sila satu didalamnya menjadi sumber pengamalan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam pernyataanya Dr Hidayatullah menegaskan bahwa : Saya kira kita semua sudah mengikuti sejarah Indonesia, bahwa Indonesia

ini dibangun, diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Agama khususnya Islam, dan perjuangan mereka itu bukan hanya untuk komunitas Muslim saja tapi untuk seluruh Rakyat Indonesia, bagi Muhammadiyah Pancasila itu sudah dinilai selesai baik secara ideologi maupun sebagai dasar negara, lantas bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu pasti agama, konsep Tauhid disana, dan semua agama punya konsep Tauhid, dalam pandangan Islam yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa itu diyakini sebagai keyakinan terhadap Allah SWT, maka semua ummat Islam sesungguhnya sudah tidak ada masalah pada sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah sejalan dan selaras dengan konsep Tauhid *La Illa Ha Illah*, maka itu menjadi dasar dari seluruh proses kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, apalagi dalam batang tubuh juga dijelaskan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mejadi lebih kuat lagi. (Sidoarjo, 2020)

Realitasnya bahwa hubungan antara agama dan negara sangat kelihatan sekali, karena ia masuk dalam dokumen resmi UUD 45 yang menjadi dasar pijakan kehidupan kebangsaan ini, tapi kemudian memang praktek dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ini masih banyak yang belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu, misal tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, banyak disana-sini terdapat intimidasi dari kelompok satu kepada kelompok lain, termasuk juga adanya potensi terjadinya disintegrasi yang kaitannya dengan sila ketiga persatuan Indonesia, karena itulah Indonesia ini tidak boleh retak atau pecah, maka konsep persatuan itu menjadi luar biasa, ada sebuah kesadaran bahwa Indonesia ini sangat majemuk, sangat plural dari berbagai sisi, untuk mengikat itu diperlukan kesefahaman untuk membangun kehidupan kebangsaan.

Dalam konteks agama, inilah yang kaitannya dengan Muamalah atau hubungan antar sesama manusia ini harus bisa ditemukan persamaanya bukan perbedaanya, kalau kita berusaha untuk mencoba mencari persamaan-persamannya maka tidak mungkin yang muncul itu perbedaan-perbedaan, ketika yang diusahakan itu mencari persamaan-persamannya maka pasti akan melahirkan persatuan, tapi kalau kaitannya dengan faham agama itu masing-masing memiliki kesadaran untuk saling menghormati, seperti tatakala adanya perubahan

dalam rumusan Piagam Jakarta dengan perubahan sila satu, ini menunjukkan sikap kenegaraan, penghormatan dan sikap toleransi dari tokoh-tokoh Muslim.

Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila itu sudah selesai dari sisi rumusan didalam lima sila Pancasila jadi ia tidak perlu diperdebatkan, namun yang perlu ditindak lanjuti adalah pengamalan akan nilai-nilai Pancasila ini seyogianya bisa diterapkan dalam kehidupan individu, kelompok, sampai pada kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, hal inilah yang perlu dijabarkan lebih luas lagi, sampai pada ranah kebijakan pemerintah, contoh sederhana untuk memahami masalah ini misalnya kalau dikaitkan dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari aspek rumusan Pancasila ini sudah jelas, bahwa semua orang menyetujui bahwa keadilan sosial itu harus bisa dirasakan oleh semua lapisan sosial kehidupan masyarakat, tapi kalau melihat fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia ini masih jauh sekali, hal ini bisa dibuktikan dengan Indeks gini yang menunjukkan stratifikasi sosial atau ketimpangan luar biasa antara kelompok the have orang kaya dengan orang miskin, kelompok borjois dan proletar.

Bagi Dr Hidayatullah M.Si, ia setuju dengan apa yang di disampaikan Pak Din, sekarang ini kita sudah selesai bicara Darul Ahdi wa Syahadah, dan perlu dikembangkan lagi konsep *Darul Hadhoroh wal Fadhilah* jadi negeri yang berkemajuan dan berkeunggulan. Dalam konteks ini, untuk membangun negara Indonesia yang berkemajuan dibutuhkan kekuatan sumber daya manusia jadi aspek manusia harus menjadi perhatian serius dengan meningkatkan Human Development Index, disamping masalah ekonomi dengan disparitas atau ketimpangan sosial yang cukup signifikan, hal ini berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih rendah, masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bermutu karena persoalan biaya, disamping itu juga jumlah sekolah sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu di Indonesia itu sedikit sekali, pada konteks ini penting untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Permasalahan pendidikan ini semestinya perlu dituntaskan, dengan meningkatkan kesadaran kolektif baik pemerintah ataupun masyarakat, dengan demikian Indonesia akan cepat mengalami perkembangan, dengan adanya

dukungan akan kebijakan-kebijakan pemerintah memihak kepada rakyat, dalam pandangan Rektor UMSIDA konsep Darul Ahdi wa Syahadah sudah selesai, tapi kemudian menerjemahkan konsep ini yang jauh lebih penting, yaitu menerjemahkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju dan keunggulan, dengan pendidikan yang bagus dan rakyatnya terdidik secara otomatis akan mampu meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan buahnya adalah teknologi.

Bentuk-bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik

Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan salah satu bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah, karena itulah tata kelola yang ada didalamnya mengacu pada aturan Persyarikatan Muhammadiyah, lantas apa yang menjadi tujuan berdirinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah, sebagaimana yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (2016), agar terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Hal ini bertujuan untuk : Pertama : Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua : Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, teknologi dan seni yang memberikan kemaslahatan, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan ummat manusia dan Ketiga terbinanya keislaman dan kemuhammadiyahan yang mencerdaskan, dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademika dan kehidupan yang luas.

Sebagaimana yang teruraikan diatas jadi secara umum jelas bahwa Muhammadiyah berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam amanah pembukaan Undang-Undang 1945, ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, dalam konteks ini melalui jalur keislaman dan keindonesiaan, lantas bagaimanakah kemudian model gerakan didalam lembaga pendidikan Tinggi Muhammadiyah dalam upaya internalisasi nilai-

nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan. Secara umum terdapat dua model implementasi nilai-nilai Islam dalam membangun dan menguatkan wawasan kebangsaan.

Model dakwah dengan Gerakan Pencerahan (Harokah Tanwiriyah) : Penguatan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kurikulum serta kegiatan kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaharu, yang mengusung gerakan *amar ama'ruf nahi munkar*, dengan asas Islam yang didasarkan pada Alquran dan Assunah, Muhammadiyah menghadirkan upaya Purifikasi atau pemurnian Aqidah, Syariah, maupun Akhlaq, gerakan pemurnian dalam konteks ini bukan berarti berhenti dalam satu kondisi dan keadaan tertentu, namun Muhammadiyah juga menghadirkan konsep gerakan Tajdid dalam menjawab setiap tantangan kehidupan sosial kebangsaan ini. Dengan mendasarkan pada gerakan pencerahan maka upaya internalisasi nilai-nilai Islam dalam berbagai sendi kehidupan bangsa ini bisa tercapai secara maksimal, gerakan pencerahan meniscayakan sebuah transformasi sosial yang liberatif dan emansipatoris namun tetap dalam koridor transendensi nilai-nilai keagamaan sebagaimana misi profetik atau kenabian.

Dalam dokumen berita resmi PP Muhammadiyah hasil Tanfid keputusan Muktamar ke 47 disebutkan bahwa gerakan dakwah Pencerahan adalah gerakan yang berikhtiar mengembangkan strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) transformasi (perubahan dinamis) untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak pada kaum *mustad'afin* serta memperkuat masyarakat *madani* (masyarakat sipil) bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pengembangan pemikiran, Muhammadiyah berpijak pada koridor tajdid yang bersifat purifikasi dan dinamisasi, serta mengembangkan orientasi praksis untuk pemecahan masalah kehidupan. Muhammadiyah mengembangkan pendidikan sebagai strategi dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi dan akal budi manusia secara utuh. Sementara itu, pembinaan keagamaan terus dikembangkan pada pengayaan nilai-nilai akidah, ibadah, akhlak dan muamalat-duniawiyah yang membangun kesalehan

individu dan sosial yang mampu mengembangkan tatanan sosial baru yang lebih religius dan humanistik.

Seperti yang dikemukakan oleh Prof Haidar Nashir (2015) bahwa gerakan pencerahan ini merupakan bagian dari spirit Islam berkemajuan, sebuah gagasan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai praktis humanisme universal, berorientasi pada upaya penyelesaian ummat, dengan terus melakukan upaya transformasi dan dinamisasi dalam berbagai bidang permasalahan bangsa sehingga spirit nasionalisme mampu membumi dan diwujudkan dengan aksi-aksi nyata, hal ini-pun juga sejalan dengan Matan Kayakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah serta pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, lantas seperti apakah betuk internaliasi nilai-nilai keislaman dalam penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik

Sebagaimana ketentuan yang dibuat dalam Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Majelis Dikti Litbang Muhammadiyah (2016), bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah dan sekaligus menjadi sarana dakwah Muhammadiyah, karena perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah Amal Usaha Muhammadiyah maka ia harus mengikuti kebijakan dan sekaligus mengamalkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah, jadi payung besar PTM itu adalah Muhammadiyah, karena itu dalam praktek penyelenggaraan pendidikan spirit yang diusung adalah spirit tujuan Muhammadiyah dengan prinsip dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan berasas Islam, berlandas Assunnah guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Karenanya menurut Dr Hidayatullah M.Si, selaku rektor UMSIDA menyatakan bahwa, dari sini ada dua hal yang cukup penting untuk diperhatikan oleh Amal Usaha Muhammadiyah termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Pertama Muhammadiyah merupakan sebagai sebuah persyarikatan organisasi, dan organisasi itu meniscayakan adanya keteraturan, ada keteraturan dalam sebuah sistem. Sehingga Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi itu, setidaknya kalau ditarik ke amal usaha dalam bentuk perguruan tinggi Muhammadiyah, terdapat dua hal pertama ada sistem yang kedua teratur. Maksud dari sistem adalah PTM itu bagian dari subsistem

organisasi, karena itu kebijakan-kebijakan dari Muhammadiyah itu harus diikukti dan selaras, dan tidak boleh keluar dari kebijakan Muhammadiyah, Untuk menyelaraskan kegaitan pendidikan dalam PTM maka kemudian persyarikatan menerbitkan berbagai macam peraturan sebagaimana yang tertuang dalam aturan majlis pendidikan tinggi Muhammadiyah.

Untuk menjabarkan tentang gerakan pencerahan, atau *harokah tanwiriyyah* khususnya dalam mengembangkan praktek kebangsaan yang bernafaskan Islam dan Keindonesiaan di perguruan tinggi Muhammadiyah di Sidoarjo, Surabaya dan Gresik, maka perlu dipahami beberapa bentuk gerakan Muhammadiyah, dimana Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Gerakan Tajdid, ketiga gerakan Muhammadiyah ini terkolaborasi menjadi satu model gerakan yang keempat yaitu gerakan yang bersifat mencerahkan,:

Pertama : Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, maka semua proses yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah itu juga harus mengembangkan nilai-nilai Islam, dan gerakan Islam yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan itu adalah adalah Islam yang serba bermutu, sehingga punya kemampuan yang berdaya saing, itu sebagai gerakan Islam. Jadi tidak hanya sekedar nilai-nilai Islam berhenti di situ saja tapi juga harus berdasarkan nilai-nilai Islam yang memajukan, jadi yang ada di PTM itu harus memunculkan nilai-nilai Islam dan perilaku yang berkemajuan.

Sebagaimana yang diatur dalam visi berdirinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah oleh Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, salah satu ciri khasnya adalah adanya menanamkan nilai-nilai Islam yang merupakan salah satu bagian dari catur darma perguruan tinggi Muhammadiyah, hal ini bisa kita lihat misalnya pada visi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan slogannya menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat, Visi Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan slogannya Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai universitas yang unggul dibidang moralitas, intelektualitas dan berjiwa enterpreneur, Visi Universitas Muhammadiyah Gresik dengan slogannya 2030 menjadi universitas unggul, mandiri yang dijiwai dengan nilai-nilai enterpreneurship islami. Nafas Islam

dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah memang sudah menjadi ciri khas, dan Islam yang dibangunpun memiliki ciri wasatiah moderat dan bersifat inklusif, materi kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah yang menjadi ciri khas PTM dikemas dalam sajian yang inklusif, demikian juga dengan materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan juga disajikan dengan nafas nilai-nilai Islam yang moderat.

Dalam sajian kurikulum di Perguruan tinggi Muhammadiyah, mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah merupakan mata kuliah wajib Universitas, dimana materi AIK ini terdiri dari 4 tema yang ditempuh dalam empat semester, AIK satu mengkaji tentang manusia dan tuhan, AIK dua mengkaji tentang ibadah, akhlaq dan muamalah, AIK Tiga membahas tentang kemuhammadiyah dan AIK Empat membahas tentang hubungan Islam dengan berbagai disiplin ilmu, dengan mengampu mata kuliah ini diharapkan lulusan mahasiswa PTM mampu menguatkan keimanan dan kepribadian dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dan visi Muhammadiyah demi kemajuan Agama dan bangsa bisa diwujudkan, misal di UMSIDA dikembangkan materi Pendidikan Karakter Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah (PKMU) yang bertujuan untuk mengembangkan karakter yang baik sesuai syariat Islam dan berlandas pada nilai dan norma sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat serta bangsa dan negara. Hal yang sama juga di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Gresik praktek penyelenggaraan pendidikan karakter selain diinsersikan didalam mata kuliah juga ditanamkan sejak mahasiswa memasuki awal semester saat menjadi mahasiswa baru, serta praktek-praktek keseharian dalam kampus seperti dalam perkuliahan, seminar dengan tema nilai-nilai Islam dan penguatan wawasan kebangsaan serta membudayakan saling salam, silaturahmi dan peduli sesama dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun penguatan dan pengembangan organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).

Kedua Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar maka di perguruan tinggi Muhammadiyah juga harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu, yang sudah barang tentu itu dakwah yang ada dalam lembaga pendidikan tidak seperti dakwah yang ada di masjid-masjid, pengajian pengajian.

karena perguruan tinggi berada dalam sebuah organisasi, maka tentunya dalam praktek penyelenggaraan pendidikan juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai karakter dalam kehidupan di kampus, misal seperti yang diungkapkan oleh Dr Hidayatullah, M.Si, sejatinya perlu ada keteladan sistem, misalnya ketika bertindak, kita harus menunjukkan kejujuran, tidak boleh melakukan penggelapan atau penyimpangan, karena ini lembaga maka harus dibuat sebuah sistem, bagaimana membangun sistem keuangan di kampus ini yang baik, kita harus menguatkan sistem keuangan, bagaimana memastikan penggunaan anggaran yang tidak dilakukan sebuah penyimpangan maka di awal tahun harus berpijak pada rencana operasional dan rencana anggaran belanja, mereka mengajukannya by sistem pencairannya by sistem laporan by sistem, semua harus dilakukan validasi pengecekan unit kerja yang mengajukan keuangan juga harus dicek cocok tidak dengan rencana operasional RAB yang ada itu, setelah dicairkan digunakan ternyata nanti masih di cek lagi oleh SPI satuan pengawas internal, hal ini merupakan contoh bagian dari menerjemahkan konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah supaya orang tidak berbuat kemungkaran sebisa mungkin.

Bagi Prof Setyo Budi selaku rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (2020) menyampaikan bahwa disamping diperlukan penguatan karakter kepada mahasiswa, sejatinya bagi pendidik atau dosen harus menjadi uswah atau teladan, dengan cara melakukan kegiatan produktif sesuai tanggung jawab dosen yaitu melakukan catur darma perguruan tinggi, meningkatkan nilai-nilai Islam sesuai dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, sekaligus produktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian, baginya korupsi bukan hanya sekedar masalah penyelewengan kewenangan dan uang semata, melainkan ia juga bisa dalam bentuk yang lain seperti lalai dalam waktu dan tanggung jawabnya sebagai dosen dalam mendidik mahasiswa dan produktif sebagai dosen, demikian juga dalam praktek keagamaan juga harus dibarengi dengan tindakan-tindakan nyata, karena ibadah bukan hanya sebatas pada hubungan terhadap Allah SWT semata melainkan ia perlu diturunkan dalam praktek ibadah-ibadah sosial.

Demikian juga dalam aturan kepegawaian dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik dalam praktek mengajar selaku selaku pengampu mata kuliah itu tidak hanya cukup *transfer of knowledge* (transfer pengetahuan) saja pada mahasiswa karena mereka juga terikat sebagai bagian dari gerakan Muhammadiyah gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar maka di sela-sela mengajar ia juga harus memasukkan nilai-nilai Islam, integrasi nilai-nilai Islam tidak hanya masuk pada materi struktur kurikulumnya, tapi di implementasi pembelajarannya itu juga harus memasukkan nilai-nilai Islam sekaligus ada proses dakwah Amar ma'ruf nahi munkar, misalnya dalam praktek penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai Islam dalam penguatan persatuan kebangsaan juga bisa digali dalam Ayat-ayat Al Quran misalnya dalam surat Al Hujurat yang menekankan pentingnya nilai-nilai ukhuwah atau persaudaraan, attaa'ruf atau hidup untuk saling mengenal satu kelompok dengan kelompok lain, attarahum hidup untuk saling mengasihi, attayus bil silmi hidup saling berdampingan, ini merupakan upaya dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan.

Ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid yaitu gerakan pembaharuan, pembaharuan di Muhammadiyah terdapat dua makna pertama purifikasi pemurnian di dalam Aqidah Ibadah dan akhlak tapi kalau menyangkut masalah muamalah Pendidikan termasuk muamalah maka berapa mana yang kedua yaitu tajdid sebagai modernisasi di sesuai dengan konteks zamannya pendidikan pada masa Kiai Ahmad Dahlan sangat sederhana tapi pada waktu itu sudah luar biasa, kita melihat saat sekarang sederhana tapi waktu itu luar biasa karena nggak ada kan tapi dalam konteks sekarang kita sudah tidak bisa lagi menerapkan sebatas apa yang diterapkan oleh Ahmad Dahlan, jadi harus ada kontekstualisasi dan modernisasi, Maka kita sudah masuk masa revolusi industri 4.0 salah satunya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik mengembangkan e-learning dan seterusnya jadi ini dimensi yang ketiga yaitu tajdid.

Ketiga gerakan sebagai *Al-Harokah Tanwiriyyah* atau yang disebut sebagai gerakan pencerahan, jadi semua proses dalam dimensi gerakan Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan Amar ma'ruf Nahi Munkar dan gerakan tajdid itu harus

memastikan mencerahkan bagi warga Muhammadiyah juga bagi warga di luar Muhammadiyah, gerakan tanwiriyyah ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam penguatan wawasan kebangsaan, sehingga menjadi bagian dari karakter mahasiswa.

Model dakwah dengan Gerakan Aksi Nyata (Da'wah Bil Amal) : Gerakan Filantropi di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Sejak berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, Kiai Ahmad Dahlan sudah konsen pada upaya untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu ketertindasan, karena sejatinya Islam adalah agama yang membebaskan, karena itulah pada masa kolonialisme, Kyai Ahmad Dahlan berusaha untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajahan dan keterbelakangan masyarakat dengan mengembangkan sistem pendidikan,, seperti yang diungkapkan oleh Dr Mahsun, M.Ag Wakil Rektor 3 UM Surabaya bahwa agama Islam sejatinya memiliki sifat *tahrir* (membebaskan), dengan demikian agama mengajarkan nilai-nilai emansipatif dan liberatif sebagaimana misi profetik atau kenabian, jadi yang namanya membebsaskan tentu akan melahirkan semangat altruisme, ini yang menjadi jargon utama Muhammadiyah jadi bukan Islam retorika, Islam wacana , Islam teoritis, tapi Islam praktis., sehingga pemahaman terhadap Islam itu bisa berdaya, hal senada juga diungkapkan oleh Dr Hidayatullah M.Si, menurutnya Muhammadiyah merupakan gerakan untuk kesejahteraan kemajuan dan kemandirian, dari awal berdirinya, Ia lebih menampilkan sebagai gerakan amal, karena itulah kemudian melahirkan amal usaha Muhammadiyah yang berkembang hingga sekarang ini dengan berbagai macam wujud dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan seterusnya, bahkan Prof Budi Setiyadi Rektor UM Gresik mengungkapkan bahwa andai saja seseorang bisa mengamalkan tujuan akan visi Muhammadiyah dengan sesungguhnya maka sejatinya ia membuka jalan kebaikan menuju kerdidhoan Tuhan demi kebaikan terhadap sesama manusia (Gresik: 2020).

Dalam catatan sejarah, Kyai Ahmad Dahlan dan murid-muridnya sangat kuat pada kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan kepada sesama, sangat cinta sesama, dan gandrung pada pekerjaan pekerjaan amal atau

filantropis, misalnya dalam film Sang Pencerah, betapa Kyai Ahmad Dahlan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya memahami Surat Al Maun sampai pada prakteknya, murid-muridnya disuruh mencari anak-anak jalanan yang belum memiliki pakaian, yang belum makan, mereka di bawa pulang diberikan pakaian dan makanan, beginilah praktek Dakwah bil Amal yang diajarkan oleh Kyai Ahmad Dahlan, beliau dikenal sebagai orang-orang yang pemurah, dermawan dan suka menolong pada sesama.

Teologi Al Maun merupakan refleksi sosial Kyai Ahmad Dahlan dalam membaca kehidupan sosial masyarakat, sejarah mencatat bahwa PKO (Pusat Kesengsaraan Umum) yang berdiri pada tahun 1918 adalah awal cikal bakal dari bentuk kedermawanan sosial, ia merupakan model lain dari filantropi Muhammadiyah, gerakan nyata Muhammadiyah terus berkembang dengan mendirikan layanan-layanan sosial seperti Panti Asuhan asraman bagi anak yatim piatu dan lain-lain, ini adalah bentuk dakwah bil amal yang secara nyata dilakukan oleh Muhammadiyah. Spirit inilah yang kemudian di implementasikan dalam pendidikan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di UM Sidoarjo, Surabaya dan Gresik, dengan mengembangkan Lazismu sebagai media gerakan zakat dan Infaq, Gerakan Infak Zakat Mahasiswa di UMSIDA (GIZMA), serta MDMC ataupun kini saat pandemi covid 19 mendirikan PP Muhammadiyah beserta Amal Usaha yang ada dibawah naungannya juga turut andil dalam penanggulangan dan pemberdayaan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak Covid 19 dengan pendirian Muhammadiyah Covid 19 Command Center : MCC

Sebagai gambaran misalnya, MDMC merupakan layanan sosial Muhammadiyah yang diberikan bagi masyarakat yang sedang terkena bencana, gerakan ini merupakan salah satu bentuk gerakan filantropi yang dalam pelaksanaannya ditunjang dengan Lazismu. Zakat, Infaq atauun sedekah yang dihimpun oleh persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola dan tersebar di seluruh Kantor layanan Lazismu yang ada di setiap Amal Usaha Muhammadiyah sampai pada tingkat ranting. Memang sebagaimana diketahui, sejak dahulu Muhammadiyah terkenal dengan lembaga pendidikan dan kesehatannya, namun pada tingkatkan periode ini Muhammadiyah mengembangkan sayapnya, mengembangkan gerakan filantropis. Terdapat dua lembaga yang

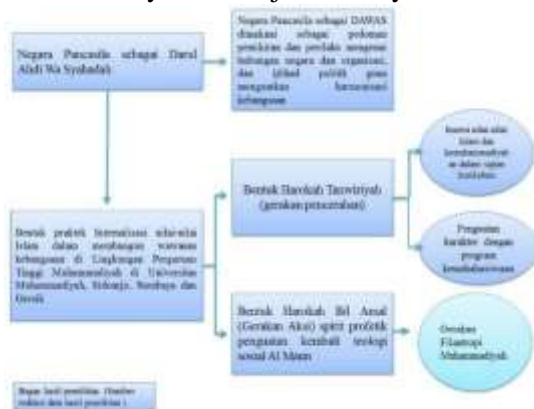
kemudian dimunculkan oleh Muhammadiyah yaitu Lazismu di semua tingkatan termasuk di amal usaha yang kedua adalah MDMC, dimana saat ini menjadi gerakan filantropi yang menembus batas nasional bangsa Indonesia saja dan tidak hanya dalam konteks Muhammadiyah saja, akan tetapi sekarang sudah bisa menembus batas negara di dunia dan MDMC adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang diakui oleh PBB mendapatkan apresiasi dari PBB.

Kehadiran Lazismu tentu memberikan banyak hal yang bersifat filantropis menolong membantu menyelamatkan sekaligus memajukan dari berbagai kalangan masyarakat yang menembus berbagai bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, Lazismu mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang memiliki kelebihan rizki untuk bersama-sama menyalurkan zakat infaq sedekahnya melalui Lazismu digunakan untuk kegiatan kemanusiaan kegiatan pendidikan kegiatan kesehatan yang semuanya diorientasikan untuk masyarakat kembali, dalam prakteknya banyak lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan dari Lazismu, sebagai bagian dari nilai kemanusiaan bantuan Lazismu bahkan bukan hanya masyarakat muslim saja melainkan juga untuk masyarakat nonmuslim juga mendapatkan layanan dari Lazismu.

Sebagai spirit Al Maunisme, pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan intruksi untuk mendirikan kantor Pelayanan Lazismu di cabang di amal usaha Muhammadiyah, dalam prakteknya semua PTM mendirikan Lazismu, dalam pelaksanaannya di kampus mengikutsertakan seluruh karyawan dosen mahasiswa untuk bergerak bersama-sama. Tujuan berdirinya Lazismu, setidaknya bisa membantu sekian ribu mahasiswa agar bisa merasakan uluran tangan kampus guna mendapatkan pendidikan yang layak. Misal tercatat di mahasiswa UM Sidoarjo ada sekitar 1500 mahasiswa yang mendapatkan bantuan, bukan hanya dalam bentuk beasiswa saja bantuan juga diberikan dalam bentuk peralatan sekolah, panti asuhan dan rumah sakit.

Bentuk nyata lainnya, guna menamamkan nilai empati dilaksanakanlah GIZMA yaitu Gerakan Infaq Sedekah Mahasiswa, yang slogannya dari mahasiswa untuk mahasiswa, dalam prakteknya kepedulian mahasiswa luar biasa, kegiatan ini dikoordinir di setiap jurusan dan setiap hari kamisnya, infaq atau sedekah mahasiswa dikumpulkan, menurut catatan pengelola LAZISMU kampus Sidoarjo, terdapat

fluktuasi yang meningkat dari waktu ke waktu, dulu awal-awalnya sebulan terkumpul 10 juta, 15 juta hingga 30 juta, namun sekarang sudah sempat menembus 40 juta, ini berarti menunjukkan adanya kesadaran dari mahasiswa untuk mahasiswa, demikian salah satu bentuk dakwah nyata di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, itu merupakan contoh model aksi nyata dalam menanamkan karakter empati terhadap sesama, khususnya pada saat ini dengan adanya pandemi covid-19 mahasiswa bisa berempati dalam gerakan yang nyata, spirit kebangsaan dalam konteks Pancasila sebagai Syahadah adalah berperan dengan aksi nyata. Secara umum berikut gambaran makna konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, dan bentuk implementasi dari upaya internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun wawasan kebangsaan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.



Gambar 2 : Skema ringkasan penelitian

SIMPULAN

Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah merupakan rumusan yang telah ditetapkan oleh Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015, rumusan ini menjadi sikap tegas Muhammadiyah dalam memposisikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang bersifat final, karena ia merupakan perjanjian dan kesepakatan bersama yang harus tetap terjaga jadi seyogianya tidak perlu, lebih dari pada itu adalah, setiap warga negara memiliki tanggungjawab kolektif agar ia mampu menjadi saksi hidup dengan mengisi kehidupan kebangsaan ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif yang bisa memajukan bangsa, karena itulah penekanan berikutnya adalah menciptakan bangsa yang memiliki peradaban maju dan berkemajuan *Dinul Hadhoroh Wal Fadhillah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, makna Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa

Syahadah di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai pedoman pemikiran dan perilaku mengenai hubungan antara agama, negara dan organisasi sekaligus sebagai ijtihad politik Muhammadiyah yang bertujuan untuk menguatkan harmonisasi kebangsaan, sekaligus sebagai transformasi dengan menghadirkan perkembangan dan perubahan sistem pendidikan yang mampu melejitkan potensi akademik, maupun non akademik Mahasiswa sehingga tercipta lulusan yang memiliki kapabilitas, integritas dengan nafaskan keislaman dan kebangsaan, hal ini dilakukan dengan dua bentuk atau model gerakan dakwah yang pertama dengan harakah tanwiriah atau gerakan pencerahan dan kedua dengan harakah bil amal atau gerakan dengan aksi nyata, hal ini nampak dengan berbagai macam kebijakan dan model pelaksanaan yang sudah diterapkan di lingkungan PTM.

Sebagai saran, kajian tentang konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, pada tahap berikutnya bisa diarahkan dalam bentuk yang lebih holistik kembali, hal ini dilakukan agar ia menemukan bentuk yang lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh Mahasiswa khususnya dalam memberikan pemahaman lebih tentang peran Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan, hal ini dilakukan dengan mencoba mengintegrasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai Kesilaman Kemuhammadiyah dalam materi kuliah landasan kepribadia seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan demikian ia bisa menjadi pedoman pemahaman yang lebih praktis sehingga bisa diaplikasikan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan dan kerjasama bantuan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan penelitian ini, secara khusus penelitian ini merupakan hibah riset institusi yang difasilitasi oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam bentuk hibah internal Riset Terapan Institusi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 442/II.3.AU/02.00/C/KEP/II/2020 dan Perjanjian /Kontrak Nomor 241.72/II.3.AU/14.00/C/PER/II/2020, sehingga dengan adanya penunjang hibah ini penelitian

bisa terlaksana meskipun perlu penyempurnaan dan perbaikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Deny JA, (2019) NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?. Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA, Penerbit Ceraf Budaya Indonesia.
- Hasnan Bahtiar, 2019 Dar al-'Ahd Wa Al-Shahadah: Upaya dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan MAARIF Vol.14, No. 1 - Juni 2019
- Majlis Pendidikan Tinggi : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (2016) Pedoman Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- Muhammad Salisul Khakim, Medi Trilaksono Dwi Abadi, (2019) Sosialisasi Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Melalui Media di Lingkunga Persyarikatan Muhammadiyah, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 No 1 Tahun 2019 hal 1-11
- Nashir, Haedar (2014), Ideologi Muhammadiyah, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah
- Nashir, Haedar, (2015), "Muktamar Teladan dan Muhammadiyah Berkemajua," dalam Abdul Mu'ti et.al.eds. Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Puspita Handayani (2017), Pendidikan Karakter Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah AIK 1 Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSIDA Prosiding Seminar Nasional Pendidikan : Tema "Desain Pembelajaran di Era ASEAN Economic Community (AEC) untuk Pendidikan Indonesia Berkemajuan" Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Prihma Sinta Utami (2019)., Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyah Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 no 2 Tahun 2019
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005)., Negara Pancasila sebagai Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Cetakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai hasil dari Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar tahun 2005
- Hidayatullah. (2020). *Wawancara Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 14 April 2020*
- Budi, Setyo. (2020). *Wawancara Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik tanggal 10 Juni 2020*
- Mahsun. (2020). *Wawancara Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juni 2020*